

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tentang Bonus Demografi

1. Teori Bonus Demografi

Menurut Achmad, bonus demografi adalah suatu kondisi di mana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun.¹ Ia juga menambahkan, kondisi ini merupakan peluang besar bagi suatu negara untuk meningkatkan kinerja ekonomi industri.² Menurut Hasdiana, di dalam kebijakan pembangunan nasional disebutkan bahwa bonus demografi adalah peluang yang harus dimanfaatkan untuk menyambut Indonesia Emas.³

Menurut Nur, bonus demografi umumnya terjadi setelah transisi demografis, di mana tingkat kelahiran menurun dan harapan hidup meningkat.⁴ Negara-negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi, seperti Korea Selatan dan Taiwan, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan standar hidup yang signifikan.⁵ Sebaliknya, kegagalan

¹ Willya Achmad et al., "Taking Advantage Of Indonesia's Demographic Bonus In 2024: Challenges And Opportunities Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Di Tahun 2024: Tantangan Dan Peluang," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 2 (2024): 4425–4434, <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.

² Ibid.

³ Hasdiana et al., "Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 Menghadapi Bonus Demografi Melalui Pembelajaran Berbasis Kreativitas," *AKSARA : Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 09, no. 2 (2023): 949–958, <http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>.

⁴ Nur Falikhah, "Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 16, no. 32 (2017).

⁵ Ibid.

dalam memanfaatkan bonus demografi dapat menyebabkan stagnasi ekonomi dan peningkatan beban sosial.⁶

Menurut Irwan, penurunan tingkat kesuburan dan peningkatan harapan hidup merupakan dua faktor utama yang mendorong terjadinya bonus demografi.⁷ Ia juga berpendapat bahwa akses terhadap kontrasepsi, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perubahan norma sosial merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan.⁸ Sementara itu menurut , kemajuan dalam bidang kesehatan, nutrisi, sanitasi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan berkontribusi pada peningkatan harapan hidup.⁹

Bonus demografi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, tabungan, dan investasi menurut Maryati.¹⁰ Satria Juga menambahkan, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif dapat mendorong produksi barang dan jasa, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi kemiskinan.¹¹ Selain itu, bonus demografi juga dapat mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pembangunan infrastruktur.¹²

⁶ Ibid.

⁷ Irwan Hermawan, "Analisis Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 2 (2019): 32–48.

⁸ Ibid.

⁹ Estro Dariatno Sihaloho, "Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Angka Harapan Hidup Kabupaten Kota Di Jawa Barat," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 117.

¹⁰ Maryati and others, 'Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi Di Sumatra Barat', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21.1 (2021), pp. 95–107, doi:10.21002/jepi.2021.07.

¹¹ Satria Aji Setiawan, "Mengoptimalkan Bonus Demografi Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Analis Kebijakan* 2, no. 2 (2019).

¹² Ibid.

Untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, menurut Abd Maliki, diperlukan investasi yang signifikan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹³ Oleh karena itu menurut Rastri dan Ratna, penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkualitas juga sangat penting untuk menyerap angkatan kerja yang besar.¹⁴ Selain itu, Heryanah juga menambahkan penguatan sistem jaminan sosial diperlukan untuk menghadapi penuaan populasi di masa depan.¹⁵ Selain penguatan sistem jaminan sosial, menurut Bayum, promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga merupakan strategi penting untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.¹⁶

B. Populasi Penduduk

1. Teori kependudukan

Menurut Ramadhan dan Setyowati, populasi penduduk merupakan faktor kunci dalam pembangunan suatu negara.¹⁷ Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menjadi pendorong ekonomi melalui peningkatan jumlah

¹³ Abd Maliki, "Optimalisasi Bonus Demografi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Ibn Khaldun : Studi Kasus Kabupaten Belitung Timur" 7, no. 2 (2024).

¹⁴ Rastri Paramita and Ratna Christianingrum, "Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja," *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara* 2, no. 1 (2022): 32–50.

¹⁵ Heryanah Heryanah, "Heryanah H. 2015. Ageing Population Dan Bonus Demografi Kedua Di Indonesia. *Populasi*. 23(2):1. Doi:10.22146/Jp.15692.Ageing Population Dan Bonus Demografi Kedua Di Indonesia," *Populasi* 23, no. 2 (2015): 1.

¹⁶ Muhamad Rahman Bayumi, Rizal Alfit Jaya, and Bunga Maratush Shalihah, "Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia," *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies* 2, no. 2 (2022).

¹⁷ Bagas Aji Ramadhan and Ani Setyowati, "Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021," *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis* 21, no. 3 (2023): 82–89.

tenaga kerja dan permintaan pasar.¹⁸ Sebagai contoh, Fitri dan Anwar dalam penelitiannya di Sulawesi Selatan, menemukan potensi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan jumlah penduduk usia produktif.¹⁹ Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan tantangan serius. Suhardi dan Ayu menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat memperburuk tingkat kemiskinan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.²⁰

Dewi mengungkapkan, tingkat kelahiran dan kematian dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kebijakan pemerintah.²¹ Migrasi, baik internal maupun internasional, juga memainkan peran penting dalam membentuk komposisi penduduk suatu wilayah.²²

Menurut Berliani, populasi dunia saat ini terus bertambah, namun laju pertumbuhannya melambat.²³ Negara-negara berkembang umumnya memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Nanda Fitri Yenny and Khairil Anwar, "Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2 (2020): 19.

²⁰ Nazori Suhandi, Efri Ayu Kartika Putri, and Sari Agnisa, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear Di Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Informatika Global* 9, no. 2 (2018): 77–82.

²¹ Sita Dewi, "Penduduk Dan Ekonomi (Kasus Di Indonesia)," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 1 (2020): 49–53, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/524/490>.

²² Ibid.

²³ Kartika Berliani, "Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 2 (2021): 872.

negara-negara maju.²⁴ Namun, pergeseran dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke tingkat yang rendah, yang dikenal sebagai transisi demografis, seringkali terjadi seiring dengan modernisasi dan pembangunan ekonomi.²⁵

Menurut Syahmida tingkat kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, akses terhadap kontrasepsi, dan kebijakan pemerintah.²⁶ Ia juga menambahkan bahwa di banyak negara berkembang, norma budaya yang mendorong keluarga besar masih berperan penting dalam tingginya tingkat kelahiran.²⁷ Sementara itu, Bagaskoro dan Alamansyah juga menyebutkan, tingkat kematian dipengaruhi oleh akses terhadap pelayanan kesehatan, nutrisi, dan sanitasi. Migrasi, baik internal maupun internasional, dipengaruhi oleh peluang ekonomi, konflik politik, dan bencana alam.²⁸

Menurut Sejati, pertumbuhan penduduk dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah tenaga kerja dan permintaan agregat.²⁹ Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menyebabkan pengangguran,

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Syahmida S Arsyad et al., "Preferensi Fertilitas Keluarga Milenial Di Indonesia," *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 1 (2021): 42–50.

²⁷ Ibid.

²⁸ Dwi Sapto Bagaskoro, Fiqih Aditya Alamsyah, and Surya Ramadhan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Demografi: Fertilitas, Mortalitas Dan Migrasi (Literature Review Perilaku Konsumen)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 2, no. 3 (2022): 303–312.

²⁹ Devit Prasetyo Sejati, "Pengangguran Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020): 98–105.

kemiskinan, dan ketidaksetaraan.³⁰ Selain itu, Sudibia menambahkan, pertumbuhan penduduk juga dapat memberikan tekanan terhadap sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik.³¹ Perubahan dalam struktur usia penduduk, seperti penuaan populasi, dapat menimbulkan tantangan bagi sistem pensiun dan perawatan kesehatan.³²

Panggabean meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi rasio ketergantungan di Indonesia dan menyoroti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.³³ Ia juga berpendapat, rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif dengan penduduk usia produktif, merupakan indikator penting dalam analisis demografi.³⁴ Rasio ketergantungan yang tinggi dapat membebani perekonomian karena proporsi penduduk usia produktif yang lebih kecil harus mendukung proporsi penduduk usia non-produktif yang lebih besar.³⁵

Ramadhan dan Idami dalam laporannya mengatakan bahwa Program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan tingkat kelahiran dengan memberikan akses terhadap

³⁰ Ibid.

³¹ Ketut Sudibia and others, 'The Effect of Education and Dependency Ratio on Economic Growth and Poverty in Papua', *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4.6 (2020), pp. 186–95 <www.ajhssr.com>.

³² Ibid.

³³ Meiran Panggabean, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dependency Ratio Di Indonesia," *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* (2020): 17, <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Meiran.pdf>.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

kontrasepsi dan pendidikan kesehatan reproduksi.³⁶ Kebijakan pemerintah terkait migrasi dan ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat migrasi.³⁷

Bariaty menemukan bukti empiris yang mendukung pentingnya tingkat pendidikan dan kualitas tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.³⁸ Ia juga menyebutkan, Investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang sehat dan terdidik cenderung lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.³⁹

Populasi penduduk adalah isu kompleks dengan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Pemahaman mendalam tentang dinamika populasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengelola pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan keberlanjutan lingkungan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

³⁶ M. Hade Ramadhan and Zahratul Idami, "Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh," *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 1 (2020): 47–57.

³⁷ Ibid.

³⁸ Radesi Bariaty et al., "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Dependency Ratio Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Langsa," *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)* 3, no. 2 (2022): 175–187.

³⁹ Ibid.

2. Indikator Populasi Penduduk

Berikut merupakan indikator dari populasi penduduk menurut Keilman⁴⁰

a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Secara umum, kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah tersebut. Satuan yang umum digunakan adalah jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²). Dalam hal ini adalah kepadatan penduduk pada 11 kota-kabupaten di Provinsi Maluku

b. Rasio jenis kelamin

Rasio jenis kelamin (Sex Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 100 perempuan. Dalam hal ini adalah rasio jenis kelamin pada 11 kota-kabupaten di Provinsi Maluku

c. Persentase penduduk

Persentase penduduk adalah proporsi atau bagian dari total populasi yang memiliki karakteristik tertentu, dinyatakan dalam bentuk persen (%). Dalam hal ini adalah persentase penduduk pada 11 kota/kabupaten di Provinsi Maluku

⁴⁰ Nico Keilman, "How Accurate Are the United Nations World Population Projections?," *Population and Development Review* 24, no. 1998 (1998): 15.

d. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah persentase perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya dihitung per tahun. LPP dapat positif (pertumbuhan), negatif (penurunan), atau nol (tidak ada perubahan). Dalam hal ini adalah laju pertumbuhan penduduk pada 11 Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku

3. Pengaruh Populasi Penduduk Terhadap Dependency Ratio

Jumlah populasi penduduk berpengaruh terhadap besar kecilnya rasio ketergantungan, daerah dengan populasi penduduk yang besar, terutama jika diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk yang non produktif, seperti anak-anak dan lansia, dapat menyebabkan kenaikan dependency ratio. Semakin banyaknya populasi yang tidak produktif dibandingkan dengan populasi yang produktif mengakibatkan beban ekonomi dan sosial pada populasi produktif (usia 15-64 tahun) akan semakin besar karena mereka harus menyediakan dukungan atau menanggung beban orang-orang yang bergantung pada mereka (usia non produktif). Jadi pertumbuhan populasi yang tidak seimbang dapat memberikan tekanan pada sistem ekonomi dan sosial suatu negara dalam hal ini dependency ratio

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

1. Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Sautra dan Zelfanetti, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah tolok ukur penting dalam mengukur vitalitas ekonomi

suatu negara.⁴¹ TPAK menggambarkan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang aktif berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.⁴² Ia juga menambahkan, semakin tinggi TPAK, semakin besar potensi pemanfaatan sumber daya manusia dan semakin besar pula peluang pertumbuhan ekonomi.⁴³

Ashari mengungkapkan bahwa TPAK tidak hanya menjadi perhatian pemerintah dan pembuat kebijakan, tetapi juga menjadi fokus penelitian akademis.⁴⁴ Ia mengungkap pengaruh signifikan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.⁴⁵ Ashari juga mendefinisikan TPAK mencakup individu yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Mereka yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan, seperti pelajar, ibu rumah tangga yang tidak bekerja, dan pensiunan, tidak termasuk dalam perhitungan TPAK.⁴⁶

Menurut Klasen, TPAK bervariasi antar negara dan wilayah, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, norma sosial, dan faktor.⁴⁷ Eastwood dan Lipton menambahkan, Negara-negara maju cenderung memiliki TPAK yang

⁴¹ Igo Septa Saputra, Zulfanetti Zulfanetti, and Jaya Kusuma Edi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Provinsi Jambi," *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 8, no. 2 (2019): 68–81.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Rafi Taufik Ashari et al., "Analisis Pengaruh TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk," *Journal Of Development and social studies* 2, no. 2 (2023).

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Stephan Klasen, "What Explains Uneven Female Labor Force Participation Levels and Trends in Developing Countries?," *World Bank Research Observer* 34, no. 2 (2019): 161–197.

lebih tinggi daripada negara berkembang.⁴⁸ Selain itu, menurut Ayuningtyas dan Islami, TPAK perempuan seringkali lebih rendah daripada laki-laki di banyak negara, mencerminkan kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja.⁴⁹ Hal ini dapat disebabkan oleh norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam dunia kerja, akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan, serta tanggung jawab domestik yang lebih besar.⁵⁰ Di lain sisi, menurut Ruchiyani, TPAK juga dapat berfluktuasi seiring waktu karena perubahan kondisi ekonomi, demografis, dan sosial.⁵¹ Misalnya, krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan TPAK karena meningkatnya pengangguran, sementara peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan TPAK.⁵²

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK, menurut pendapat Bloom dan Canning, meliputi faktor demografis (struktur usia penduduk, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian), faktor ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat upah, dan kondisi pasar tenaga kerja), faktor sosial (norma sosial terkait peran gender, tingkat pendidikan, dan akses terhadap layanan pengasuhan anak), dan kebijakan

⁴⁸ Robert Eastwood and Michael Lipton, "Demographic Transition in Sub-Saharan Africa: How Big Will the Economic Dividend Be?," *Population Studies* 65, no. 1 (2011): 9–35.

⁴⁹ Andini Ayuningtyas and Fitrah Sari Islami, "Analisis Perkembangan Penduduk Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 6 (2022): 167–188.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Yolanda Ruchiyani and others, Faktor-Faktor Penyebab Kerentanan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1.6 (2022), pp. 1–8 <<https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/1524/1059>>.

⁵² Ibid.

pemerintah (kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan sosial).⁵³ Berdasarkan penelitian Aaronsin, Peningkatan TPAK dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penghapusan hambatan partisipasi, dan implementasi kebijakan pendukung.⁵⁴ Ia juga menambahkan, Peningkatan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong investasi, dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.⁵⁵ Selain itu, Suparyati dan Habsya juga mengungkapkan, Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan mempersiapkan angkatan kerja yang terampil dan relevan dengan kebutuhan pasar.⁵⁶ Penghapusan hambatan partisipasi dapat dilakukan dengan mengatasi diskriminasi gender, meningkatkan akses terhadap layanan pengasuhan anak, dan memberikan insentif bagi kelompok marginal untuk bekerja.⁵⁷

Kebijakan pendukung dapat berupa pemberian insentif pajak, tunjangan pengangguran, dan program pelatihan kerja. Dengan meningkatkan TPAK, suatu negara dapat meningkatkan produktivitas,

⁵³ David E. Bloom & David Canning, "NBER- National Bureau of Economic Research. 'Global Demographic Change: Dimensions and Economic Significance,'" *Working Paper 10817* <http://www.nber.org/papers/w10817> (2004).

⁵⁴ Stephanie Aaronson et al., "Labor Force Participation: Recent Developments and Future Prospects," *Brookings Papers on Economic Activity*, no. FALL 2014 (2014): 197–255.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Atik Suparyati and Chundakus Habsya, "Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi Untuk Bersaing Di Pasar Global," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1921–1927.

⁵⁷ Ibid.

mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

2. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator angkatan kerja yakni sebagai berikut;⁵⁸

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (biasanya 15-64 tahun) yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini adalah TPAK pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

b. Persentase bekerja terhadap angkatan kerja

Persentase bekerja terhadap angkatan kerja (PBTAK) adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang bekerja dari total angkatan kerja. Indikator ini menggambarkan seberapa besar angkatan kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi produktif.. Dalam hal ini adalah persentase bekerja terhadap angkatan kerja pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

c. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan

⁵⁸ Organisation for Economic and Co-operation and Development, "Labour Force Participation Rate," *Organisation for Economic Co-Operation and Development*, last modified 2023, accessed June 26, 2024, <https://doi.org/10.1787/08785bba-en>.

kerja di suatu wilayah dan waktu tertentu. Dalam hal ini adalah tingkat pengangguran terbuka pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

d. Tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran merujuk pada proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun secara aktif mencari pekerjaan pada periode waktu tertentu. Dalam hal ini adalah tingkat pengangguran pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

3. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Dependency Ratio

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja mempengaruhi besar kecilnya rasio ketergantungan, Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin rendah rasio ketergantungan muda dan semakin tinggi rasio ketergantungan. Ketika penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lebih banyak, beban ketergantungan pada populasi usia non produktif akan berkurang. Hal Ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi karena produktivitas tenaga kerja meningkat dan menurunkan rasio ketergantungan.

D. Indeks Pembangunan Manusia

1. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Yektiningsih menjadikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator krusial yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia secara komprehensif, mencakup dimensi ekonomi,

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.⁵⁹ IPM tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, seperti yang dikemukakan Cook and Davíðsdóttir dalam *An Appraisal of Interlinkages between Macro-Economic Indicators of Economic Well-Being and the Sustainable Development Goals*.⁶⁰

Menurut Rahmah, IPM dihitung sebagai indeks komposit yang menggabungkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.⁶¹ Huang dalam tulisannya menyebutkan World Health Organization mengklasifikasi IPM dalam beberapa dimensi, dimensi umur panjang dan sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kondisi kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan.⁶² Sementara Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang menunjukkan tingkat pendidikan dan akses terhadap pendidikan, faktor-faktor yang diteliti oleh Kan dan Lee dalam hubungannya dengan kesuburan.⁶³ Selain itu juga, menurut Parengkuan, dimensi standar hidup layak diukur dengan

⁵⁹ Endang Yektiningsih, "Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018," *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 18, no. 2 (2018): 32–50.

⁶⁰ David Cook and Brynhildur Davíðsdóttir, "An Appraisal of Interlinkages between Macro-Economic Indicators of Economic Well-Being and the Sustainable Development Goals," *Ecological Economics* 184 (2021): 1–27.

⁶¹ Nadhifa Ar Rahmah et al., "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Ipm Di Kota Payakumbuh," *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 9, no. 1 (2023): 222.

⁶² Guogui Huang, Fei Guo, and Gong Chen, "Multidimensional Healthy Life Expectancy of the Older Population in China," *Population Studies* 75, no. 3 (2021): 421–442.

⁶³ Kamhon Kan and Myoung Jae Lee, "The Effects of Education on Fertility: Evidence From Taiwan," *Economic Inquiry* 56, no. 1 (2018): 343–357.

pendapatan nasional bruto per kapita, yang mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.⁶⁴

Secara global, trend IPM menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia di berbagai belahan dunia.⁶⁵ Namun, kesenjangan IPM antara negara maju dan berkembang masih signifikan, menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai pembangunan manusia yang merata, seperti yang dianalisis oleh Kusuma mengenai korelasi antara pertumbuhan populasi dan ekonomi.⁶⁶ Handalani juga meneliti demografi pembangunan di Asia Tenggara, menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi IPM.⁶⁷

Menurut Hasibuan dan Syahbudi Berbagai faktor mempengaruhi IPM, termasuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan.⁶⁸ Ia juga menambahkan, Investasi

⁶⁴ Christian David Parengkuan, Theodora Maulina Katiandagho, and Charles Reijnaldo Ngangi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sulawesi Utara," *Agri-Sosioekonomi* 19, no. 2 (2023): 1167–1174.

⁶⁵ Hannah H. Chang and others, 'Preventing Preterm Births: Analysis of Trends and Potential Reductions with Interventions in 39 Countries with Very High Human Development Index', *The Lancet*, 381.9862 (2021), pp. 223–34, doi:10.1016/S0140-6736(21)61856-X.

⁶⁶ Dewi Septiani Dwi Kusuma, Sudati Nur Sarfiah, and Yustirania Septiani, "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017," *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 1, no. 3 (2019): 282–293.

⁶⁷ Radite Teguh Handalani, "Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Asia Tenggara," *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 2, no. 2 (2018): 118–137.

⁶⁸ Siti Amrina Hasibuan and Muhammad Syahbudi, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *Jurnal Masharif Al-Syariah* 7, no. 4 (2022): 1158–1166.

dalam pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.⁶⁹

Adapun dampak IPM yang tinggi menurut Surajit, sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Negara-negara dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan standar hidup yang lebih layak.⁷⁰

Dwitayanti menambahkan, peningkatan IPM juga dapat menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁷¹

Si'lang dan Hasil menyebutkan upaya meningkatkan IPM memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu untuk Investasi dimana pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama, disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁷² Selain itu, menurut Fauziyah penting juga untuk mempromosikan kesetaraan gender, melindungi lingkungan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.⁷³

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Surajit Deb, 'Gap between GDP and HDI: Are the Rich Country Experiences Different from the Poor?', *IARIW-OECD Special Conference*, I, 2019 <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty_Reduction/Towards_SustainingMDG_Web1005.pdf>.

⁷¹ Yevi Dwitayanti et al., "Determinan Investasi Di Indonesia," *Jurnal Proaksi* 11, no. 1 (2024): 184–200.

⁷² Indrasuara Luther Sirangi Si'lang, Zamruddin Hasid, and Priyagus, "Analysis of Factors That Influence the Human Development Index," *Jurnal Manajemen* 11, no. 2 (2019): 159–169, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMEN>.

⁷³ Fauziyah and Whinarko Juliprijanto, "Pengaruh Ketimpangan Pendidikan Antar Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Ekonomi & Bisnis* 21, no. 1 (2022): 740–750.

Studi menunjukkan adanya hubungan negatif antara rasio ketergantungan dengan IPM, seperti yang diteliti oleh Zuhairoh, mengungkapkan Rasio ketergantungan yang tinggi, di mana proporsi penduduk usia non-produktif lebih besar daripada penduduk usia produktif, dapat menghambat pembangunan manusia karena beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.⁷⁴ Hal ini sesuai dengan penelitiannya fuad Arifin di Nusa Tenggara Timur yang menganalisis hubungan antara IPM dan rasio ketergantungan di Maluku dari tahun 2010 hingga 2020.⁷⁵

Keluarga memiliki peran penting dalam pembangunan manusia. Keluarga yang sehat dan harmonis dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan finansial yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, seperti yang dijelaskan oleh Willis.⁷⁶ Kurniawaty juga menambahkan, bahwa keluarga juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai positif dan keterampilan hidup yang penting bagi kesuksesan di masa depan.⁷⁷

⁷⁴ Zia Azuro Zuhairoh, "Pengaruh Angka Kematian Bayi, Angka Partisipasi Murni, Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Biometrika dan Kependudukan (Journal of Biometrics and Population)*, no. Vol. 7 No. 1 (2018): JURNAL BIOMETRIKA DAN KEPENDUDUKAN (2018): 87–95, <https://e-journal.unair.ac.id/IBK/article/view/8332/pdf>.

⁷⁵ Fuad Arifin and Sitti Retno Faridatussalam, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Bonus Demografi Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 9, no. 3 (2023): 958–966.

⁷⁶ Robert J Willis, "What Have We Learned from the Economics of the Family?," *American Economic Review Papers and Proceedings*, 1987.

⁷⁷ Julia Bea Kurniawaty, "Education Trisentra Problems in Instrumenting Pancasila Values Ahead in Technology 5.0 Era," *Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan* 2, no. 2 (2023): 33–45, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JPIT/article/viewFile/619/913>.

Bonus demografi, yaitu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia non-produktif, dapat menjadi peluang emas untuk meningkatkan pembangunan manusia, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Bloom, Canning, dan Sevilla.⁷⁸ Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, diperlukan investasi yang signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.⁷⁹

2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Berikut merupakan indikator IPM.⁸⁰

a. Angka harapan hidup (AHH)

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir dalam suatu populasi, dengan asumsi tingkat kematian pada saat kelahiran tetap konstan. Dalam hal ini adalah angka harapan hidup pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

b. Indeks pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai pencapaian rata-rata suatu negara atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dalam hal ini adalah indeks pembangunan manusia pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

⁷⁸ Dwitayanti et al., "Determinan Investasi Di Indonesia."

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Assa Faclassuffa, "Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks."

c. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. RLS dihitung berdasarkan lama sekolah efektif yang telah diselesaikan, tidak termasuk tahun-tahun yang dihabiskan untuk mengulang kelas. Dalam hal ini adalah rata-rata lama sekolah pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

d. Pengeluaran perkapita

Pengeluaran per kapita adalah rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode tertentu, biasanya dihitung per tahun atau per bulan. Pengeluaran ini mencakup semua jenis pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, baik yang dibeli, diperoleh sebagai hadiah, maupun dihasilkan sendiri. Dalam hal ini adalah pengeluaran per kapita pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap *Dependency Ratio*

Hal yang paling utama dalam mengukur *dependency ratio* adalah dengan melihat seberapa banyak atau seberapa besar rasio penduduk usia produktif menanggung beban penduduk usia non produktif. Dalam hal ini jika kita kaitkan dengan IPM maka, timbul pertanyaan baru yakni apakah banyaknya usia produktif memiliki kualitas yang dibutuhkan di dunia kerja atau membuat peluang kerja baru atau malahan mereka hanya memiliki status usia produktif tanpa spesifikasi skill atau kualitas yang diharapkan.

Oleh karena itu angkatan kerja saja tidak cukup untuk menurunkan rasio ketergantungan dibutuhkan juga kualitas SDM, salah satunya dengan melihat IPM.

E. Teori dan Konsep Kemiskinan

1. Teori Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu krusial dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat secara global, seperti yang diungkapkan Daw dalam tulisannya *Applying the Ecosystem Services Concept to Poverty Alleviation*.⁸¹ Ia menambahkan kemiskinan tidak hanya dari sekadar kekurangan materi, kemiskinan menghambat akses individu terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi penuh dalam masyarakat.⁸² Penelitian oleh Brooks dan Duncan menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dampak jangka panjang yang merugikan terhadap perkembangan kognitif dan fisik anak-anak, yang pada gilirannya membatasi peluang mereka di masa depan.⁸³

Bialowolska menjelaskan, kemiskinan tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup ketidakmampuan mencapai standar hidup yang layak dibandingkan dengan anggota masyarakat

⁸¹ Tim Daw et al., "Applying the Ecosystem Services Concept to Poverty Alleviation: The Need to Disaggregate Human Well-Being," *Environmental Conservation* 38, no. 4 (2011): 370–379.

⁸² Ibid.

⁸³ Jeanne Brooks-Gunn and Greg J. Duncan, "The Effects of Poverty on Children," *Future of Children* 7, no. 2 (1997): 55–71.

lainnya, serta kekurangan dalam dimensi kesehatan dan pendidikan.⁸⁴ Menurut Alkire dan Santos, kemiskinan absolut, relatif, dan multidimensi menjadi dimensi yang saling berkaitan dalam memahami kompleksitas isu ini.⁸⁵ Ia juga mengembangkan konsep kemiskinan multidimensi, yang mengukur kemiskinan tidak hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.⁸⁶

Meskipun telah terjadi kemajuan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem secara global, jutaan orang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan tetap menjadi masalah serius, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisannya Nasir 2023.⁸⁷ McCann dan Matenga juga menambahkan, pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini, mendorong lebih banyak orang ke dalam jurang kemiskinan dan meningkatkan kerentanan kelompok miskin.⁸⁸

Berbagai faktor berkontribusi pada kemiskinan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lambat atau tidak merata, ketimpangan akses terhadap sumber daya, konflik dan ketidakstabilan politik, serta bencana

⁸⁴ Dorota Weziak-Bialowolska, "Spatial Variation in EU Poverty with Respect to Health, Education and Living Standards," *Social Indicators Research* 125, no. 2 (2016): 451–479, <http://dx.doi.org/10.1007/s11205-014-0848-7>.

⁸⁵ Sabina Alkire and Maria Emma Santos, "Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries," *SSRN Electronic Journal*, no. 3 (2012).

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Canh Phuc Nguyen and Muhammad Ali Nasir, "An Inquiry into the Nexus between Energy Poverty and Income Inequality in the Light of Global Evidence," *Energy Economics* 99, no. 0 (2021): 1–39.

⁸⁸ Gerard McCann and Chrispin Matenga, "COVID-19 and Global Inequality," *COVID-19 in the Global South* (2022): 161–172.

alam dan perubahan iklim, seperti yang dijelaskan oleh Le dan Wu.⁸⁹ Faktor-faktor ini saling terkait dan menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan.

Geovani menjelaskan, dampak kemiskinan sangat luas dan merugikan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kerentanan terhadap eksploitasi.⁹⁰ Dwitayanti juga menambahkan, kemiskinan menyebabkan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, sanitasi yang buruk, dan gizi buruk, sehingga meningkatkan risiko penyakit dan kematian.⁹¹ Samarakoon dan Parinduri menjelaskan dalam konteks Indonesia, anak-anak dari keluarga miskin sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan berkualitas, mengalami putus sekolah, dan memiliki tingkat buta huruf yang tinggi, yang membatasi peluang mereka di masa depan.⁹² Selain itu, Pratama menyebutkan bahwa kemiskinan juga membuat individu rentan terhadap eksploitasi, seperti pekerja anak, perdagangan manusia, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.⁹³

⁸⁹ Yuheng Li, Wenhao Wu, and Yongsheng Wang, “Global Poverty Dynamics and Resilience Building for Sustainable Poverty Reduction,” *Journal of Geographical Sciences* 31, no. 8 (2021): 1159–1170.

⁹⁰ Iwoeng Geovani et al., “Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children under the Age to Realise Legal Protection from Human Rights Aspects (Research Study at the Office of Social and Community Empowerment in Batam City).,” *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences* 1, no. 1 (2021): 45–52, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>.

⁹¹ Dwitayanti et al., “Determinan Investasi Di Indonesia.”

⁹² Shanika Samarakoon and Rasyad A. Parinduri, “Does Education Empower Women? Evidence from Indonesia,” *World Development* 66 (2015): 428–442, <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.09.002>.

⁹³ Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, and Ferario Mahatam Harya, “Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021): 23–33.

Sari menjelaskan, Mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan memastikan manfaat pertumbuhan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan.⁹⁴ Selain itu, ia juga menganggap investasi dalam modal manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, sangat penting untuk memberdayakan individu dan meningkatkan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan.⁹⁵ Ia juga menambahkan, perlindungan sosial yang efektif, seperti bantuan tunai, asuransi kesehatan, dan program bantuan pangan, diperlukan untuk memberikan jaring pengaman bagi kelompok rentan dan mengurangi dampak kemiskinan.⁹⁶

World Bank dalam tulisannya *Poverty and Shared Prosperity* mengutarakan bahwa pemberdayaan masyarakat juga penting untuk memberikan suara dan kontrol kepada masyarakat miskin atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.⁹⁷ Di situ juga dikatakan,

⁹⁴ Novi Dianita Sari et al., “Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan Di Era Pemerintahan Jokowi Presentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2019-2023 (%),” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)* 2, no. 3 (2024): 14–24, <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/download/2112/1687>.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ World Bank, *Poverty and Shared Prosperity 2022 : Correcting Course (English)*, ed. Jed Friedman, 1st ed. (Washington, 2022), <http://documents1.worldbank.org/curated/en/099750110062235316/pdf/IDU07dfa30ac034520434108ecd0db3a26cd8be6.pdf>.

kerjasama internasional juga diperlukan untuk memobilisasi sumber daya dan keahlian untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang.⁹⁸ Dengan mengatasi kemiskinan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi semua

2. Indikator kemiskinan

Indikator kemiskinan yakni⁹⁹

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin adalah proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Dalam hal ini adalah hal ini adalah persentase penduduk miskin pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

b. Indeks kedalaman kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin dalam atau parah tingkat

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, "Ini Step by Step Memahami Indikator Kemiskinan Makro," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2024, accessed June 26, 2024, <https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/23/270/ini-step-by-step-memahami-indikator-kemiskinan-makro.html>.

kemiskinan di suatu wilayah. Dalam hal ini adalah indeks kedalaman kemiskinan pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Dependency Ratio

Dependency ratio atau rasio ketergantungan menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk yang tidak produktif, seperti anak-anak dan lansia.

Penyebaran penduduk miskin pada suatu wilayah dapat mempengaruhi dependency ratio. Jika jumlah penduduk miskin meningkat, maka jumlah penduduk yang bergantung pada penghasilan penduduk usia produktif juga akan meningkat. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi suatu wilayah.

F. Konsep Dependency Ratio

1. Teori Dependency ratio

Dependency ratio (rasio ketergantungan) adalah indikator demografis krusial yang mengukur proporsi penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun), seperti yang dijelaskan oleh Harasty dan Ostermeier.¹⁰⁰ mereka juga menambahkan, rasio ini memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung kelompok usia yang tidak produktif, seperti anak-anak dan

¹⁰⁰ Claire Harasty and Martin Ostermeier, *Population Ageing: Alternative Measures of Dependency and Implications for the Future of Work*, International Labour Organization (Geneva: ILO Working Paper, 2020), <https://www.econstor.eu/handle/10419/263072>.

lansia.¹⁰¹ Selain itu, menurut Skirbekk terdapat dua jenis *dependency ratio*, yaitu *youth dependency ratio* yang mengukur proporsi anak-anak (0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif, dan *old-age dependency ratio* yang mengukur proporsi lansia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif. Total *dependency ratio* menggabungkan kedua kelompok usia non-produktif ini.¹⁰²

Pratama Zein dan Harya menjelaskan bahwa *Dependency ratio* digunakan untuk menganalisis tren demografis, merancang kebijakan sosial, dan memproyeksikan kebutuhan sumber daya di masa depan.¹⁰³ Secara global, *dependency ratio* mengalami perubahan seiring dengan transisi demografis. Di negara-negara maju, *old-age dependency ratio* cenderung meningkat karena peningkatan harapan hidup dan penurunan tingkat kelahiran, seperti yang dijelaskan oleh Hinrichs.¹⁰⁴ Sementara itu, di negara-negara berkembang, *youth dependency ratio* seringkali tinggi karena tingkat kelahiran yang masih tinggi, seperti yang diteliti oleh Mehri Messkoub dan Kunkel.¹⁰⁵

Perubahan dalam *dependency ratio* memiliki implikasi signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan. Rasio ketergantungan yang tinggi

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Vegard Skirbekk et al., "The Health-Adjusted Dependency Ratio as a New Global Measure of the Burden of Ageing: A Population-Based Study," *The Lancet Healthy Longevity* 3, no. 5 (2022): e332–e338, [http://dx.doi.org/10.1016/S2666-7568\(22\)00075-7](http://dx.doi.org/10.1016/S2666-7568(22)00075-7).

¹⁰³ Pratama, Zein, and Harya, "Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya."

¹⁰⁴ Karl Hinrichs, "Recent Pension Reforms in Europe: More Challenges, New Directions. An Overview," *Social Policy and Administration* 55, no. 3 (2021): 409–422.

¹⁰⁵ Nader Mehri, Mahmood Messkoub, and Suzanne Kunkel, "Trends, Determinants and the Implications of Population Aging in Iran," *Ageing International* 45, no. 4 (2020): 327–343.

dapat membebani penduduk usia produktif, yang harus menanggung biaya pendidikan, kesehatan, dan pensiun bagi kelompok usia tidak produktif, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Geovani.¹⁰⁶ Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, seperti yang dijelaskan oleh Sari.¹⁰⁷

Pratama, Zein, and Harya mengatakan peningkatan *old-age dependency ratio* dapat menimbulkan tekanan pada sistem pensiun dan anggaran pemerintah.¹⁰⁸ Di sisi lain, penurunan *youth dependency ratio* dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang disebut "bonus demografi".¹⁰⁹ Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi ini, Sari mengungkapkan, diperlukan investasi yang cukup dalam pendidikan dan kesehatan untuk mempersiapkan generasi muda memasuki pasar tenaga kerja.¹¹⁰

Menurut Omar dan Inaba perubahan dalam *dependency ratio* juga dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan upah. Selain itu, perubahan ini memerlukan penyesuaian dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perawatan lansia.¹¹¹ Oleh

¹⁰⁶ Geovani et al., "Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children under the Age to Realise Legal Protection from Human Rights Aspects (Research Study at the Office of Social and Community Empowerment in Batam City)."

¹⁰⁷ Sari et al., "Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan Di Era Pemerintahan Jokowi Presentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2019-2023 (%)."

¹⁰⁸ Pratama, Zein, and Harya, "Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya."

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Sari et al., "Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan Di Era Pemerintahan Jokowi Presentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2019-2023 (%)."

¹¹¹ Md Abdullah Omar and Kazuo Inaba, "Does Financial Inclusion Reduce Poverty and Income Inequality in Developing Countries? A Panel Data Analysis," *Journal of Economic Structures* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214-4>.

karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami tren *dependency ratio* dan merancang kebijakan yang sesuai untuk menghadapi perubahan demografis.¹¹²

Christiani menyebutkan, beberapa strategi untuk mengelola *dependency ratio* antara lain mempromosikan keluarga berencana untuk mengurangi tingkat kelahiran dan menurunkan *youth dependency ratio*.¹¹³

Menurut Pratama, meningkatkan usia pensiun dapat membantu mengurangi *old-age dependency ratio* dengan memperpanjang usia produktif.¹¹⁴ Bayumi menambahkan, mendorong partisipasi angkatan kerja, terutama di kalangan perempuan dan lansia, juga dapat membantu mengurangi beban ekonomi.¹¹⁵ Selain itu Skirbekk berpendapat, reformasi sistem pensiun dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan langkah penting lainnya untuk menghadapi perubahan demografis dan memastikan kesejahteraan semua kelompok usia.¹¹⁶

2. Indikator *Dependency Ratio*

Indikator *Dependency Ratio* mengukur perbandingan antara jumlah individu yang tidak bekerja (biasanya kelompok usia tergantung seperti

¹¹² Ibid.

¹¹³ Charis Christiani, *Strategi Peningkatan Kesadaran KB Dikalangan Nelayan. Peran Sosial Ekonomi Dan Motivasi*, ed. Ratnawati Dwi Putranti, 2nd ed. (Demak: Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, 2023), file:///D:/tesis kb/2024 BUKU SStrategi pelayanan KB.pdf.

¹¹⁴ Pratama, Zein, and Harya, “Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya.”

¹¹⁵ Bayumi, Jaya, and Shalihah, “Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia.”

¹¹⁶ Skirbekk et al., “The Health-Adjusted Dependency Ratio as a New Global Measure of the Burden of Ageing: A Population-Based Study.”

anak-anak dan lansia) dengan jumlah individu yang bekerja (kelompok usia produktif). Menurut Skirbekk ada dua jenis utama dari indikator ini¹¹⁷:

a. *Dependency ratio* muda

Dependency Ratio Muda (DRM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Indikator ini menggambarkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung penduduk usia muda yang belum produktif. Dalam hal ini adalah *dependency ratio* muda pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

b. *Dependency ratio* tua

Dependency Ratio Tua (DRT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia lanjut (biasanya 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (biasanya 15-64 tahun). Indikator ini menggambarkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung penduduk usia lanjut yang sudah tidak produktif. Dalam hal ini adalah *dependency ratio* tua pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

c. *Dependency ratio*

Dependency Ratio (Rasio Ketergantungan) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (umumnya 0-14 tahun dan 65+ tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di

¹¹⁷ Ibid.

suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam hal ini adalah *dependency ratio* pada 11 Kota-Kabupaten di Provinsi Maluku.

3. Pengaruh *Dependency Ratio* Terhadap Bonus Demografi

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan indikator atau alat pengukur untuk melihat apakah fenomena bonus demografi di suatu negara memberi pengaruh positif terhadap perekonomian atau sebaliknya. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka akan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif terhadap penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan jika persentase rasio ketergantungan semakin rendah maka semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk produktif terhadap penduduk belum dan tidak produktif.

Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih pesat dibanding dengan pertumbuhan penduduk muda memberikan peluang untuk mendapatkan bonus demografi. Hal ini dapat terwujud ketika pemerintah sanggup merealisasikan kebijakan yang tepat dengan menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk meningkatkan produktivitas.

G. Perspektif ekonomi islam terhadap populasi penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, *Dependency Ratio* dan Kemiskinan

1. Populasi penduduk perspektif islam

Islam memandang populasi penduduk bukan hanya sebagai angka statistik, melainkan sebuah keseimbangan yang fundamental bagi

kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Keseimbangan populasi dikaitkan dengan tanggung jawab individu, keluarga, dan negara. Islam memperbolehkan keluarga berencana yang bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kesehatan ibu dan anak, serta kualitas hidup keluarga. Hal ini sejalan pendapat para ulama yang tercantum di dalam kitab *Ahkamul Fuqaha* yang dikutip di dalam penelitiannya Rijali dengan judul Pendidikan Keluarga Berencana (KB) Dalam Keluarga Islam: Kajian Living Hadis Dalam Menguatkan Keluarga Sejahtera.¹¹⁸

Peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menjadi kunci dalam membina generasi penerus yang berkualitas. Al-Qur'an Surat *At-Taubah* ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”¹¹⁹

Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikutip oleh Salsabila, bahwa mereka ingin memperoleh keturunan yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah sehingga hati mereka menjadi sejuk melihat keturunannya dalam keadaan demikian, baik di dunia maupun di

¹¹⁸ Syamsu Rijal, “Pendidikan Keluarga Berencana (KB) Dalam Keluarga Islam: Kajian Living Hadis Dalam Menguatkan Keluarga Sejahtera,” *Jurnal Serambi Ilmu Journal of Scientific Information and Educational Creativity* 24, no. 2 (2023): 227–238.

¹¹⁹ Qur'an Kemenag, “At-Taubah,” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, last modified 2024, accessed June 26, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>.

akhirat.¹²⁰ Salsabila juga menambahkan keluarga adalah miniatur dari populasi penduduk.¹²¹ Penduduk yang baik dan berkualitas dapat dicerminkan dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, menyejukkan hati dan bertakwa.¹²²

Negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan populasi. menunjukkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Fadila dalam tulisannya Kebijakan yang mendukung keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang berkelanjutan, menjadi kunci untuk mencapai populasi ideal.¹²³

Menurut Arifin dan Faridatussalam, populasi penduduk yang ideal bukan hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga kualitasnya.¹²⁴ Salsabila juga menambahkan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, dan akhlak yang mulia menjadi pondasi penting bagi generasi penerus yang unggul.¹²⁵ Selain itu, menurut Suhandi dampak populasi yang tidak seimbang dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial.

¹²⁰ Anggun Salsabila, "Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh Terhadap Surah Al-Furqan Ayat 74 Dan Kaitannya Dengan Praktek Childfree" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37224/>.

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

¹²³ Nurul Fadila, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2010): 1–18.

¹²⁴ Fuad Arifin and Sitti Retno Faridatussalam, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Bonus Demografi Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021."

¹²⁵ Salsabila, "Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh Terhadap Surah Al-Furqan Ayat 74 Dan Kaitannya Dengan Praktek Childfree."

Penelitian dan data statistik tentang populasi di berbagai negara menjadi acuan untuk merumuskan solusi yang tepat.¹²⁶

Menurut Rijal, kombinasi antara KB yang bertanggung jawab, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, menjadi solusi untuk mencapai populasi ideal.¹²⁷ Program pemerintah yang mendukung keluarga, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerja sama antar pihak, menjadi kunci untuk mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan dalam konteks populasi penduduk.

2. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perspektif islam

Letsoin berpendapat, kerja atau beramal adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa saja yang menjadi tujuannya.¹²⁸ bekerja adalah fitrah manusia untuk memburu rezeki sebagai penopang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan agar bisa bertahan hidup. Dalam Islam, bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan kewajiban dan ibadah. Menurut Hidayah dan Rahmawati bekerja tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang individu akan tetapi bekerja

¹²⁶ Suhandi, Putri, and Agnisa, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear Di Kota Palembang."

¹²⁷ Rijal, "Pendidikan Keluarga Berencana (KB) Dalam Keluarga Islam: Kajian Living Hadis Dalam Menguatkan Keluarga Sejahtera."

¹²⁸ Adawia Letsoin, Manajemen Bisnis Syariah, and Ajaran Islam, "Perintah Bekerja Dalam Islam :," *Jahe I* (2023): 56–61, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>.

juga untuk keluarga bahkan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial.¹²⁹

Kewajiban bekerja sejalan dengan Al-Qur'an Surat *At-taubah* ayat 105:

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”¹³⁰

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan kata "amal" dalam ayat tersebut, maknanya dalam bahasa Indonesia berarti pekerjaan, usaha, perbuatan, atau keaktifan hidup. Hamka juga menambahkan pekerjaan menjadi wajib untuk seseorang agar dapat melanjutkan hidup mereka, akan tetapi dengan syarat pekerjaan mereka harus pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah pun Maha melihat apa yang dikerjakan.¹³¹

. Bekerja menjadi sarana untuk berkontribusi bagi kemajuan umat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil penelitian Arifin dan

¹²⁹ Farida Rahmawati and Zulfa Miftha'ul Hidayah, “Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)* 7, no. 1 (2020): 110.

¹³⁰ Kemenag, “At-Taubah.”

¹³¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 4th ed. (Jakarta: Djakarta : Pembimbing Masa, 1968), [https://ia902800.us.archive.org/12/items/tafsiralazhar08_201912/Tafsir Al-Azhar 04.pdf](https://ia902800.us.archive.org/12/items/tafsiralazhar08_201912/Tafsir%20Al-Azhar%2004.pdf).

Faridatussalam yang mengatakan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.¹³²

Namun, Islam tidak hanya menekankan kewajiban bekerja, tetapi juga etika dan keseimbangannya. Bekerja harus dilakukan dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab, Sakinah dalam tulisannya mengutip perkataan nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan terus-menerus seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan terus menerus seorang hamba itu berdusta dan memilih yang dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, dimana Tirmidzi menshahihkannya).¹³³

Selain itu, dalam tulisannya Ghafur dan Fadila menyebutkan Islam memberikan wewenang kepada pemerintah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan memberikan perlindungan bagi pekerja.¹³⁴ Wicaksono juga menambahkan warga dalam hal ini mereka yang berusia kerja (angkatan kerja) terpenuhi haknya maka mereka akan

¹³² Fuad Arifin and Sitti Retno Faridatussalam, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Bonus Demografi Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021.”

¹³³ Wafa Salsabila Sakinah, Ilim Abdul Halim, and Dadang Darmawan, “Hadis Tentang Kejujuran Sebagai Spirit Untuk Generasi Milenial Di Tanah Air,” *Gunung Djati Conference Series* 8, no. 1 (2022): 73–92.

¹³⁴ Fadila, “Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam.”

mengaktualisasikan potensinya sebagai manusia yang produktif. Dengan kata lain penduduk yang berkualitas tinggi dapat memajukan ekonomi suatu daerah.¹³⁵

Meningkatnya TPAK dapat membawa dampak positif seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran. Namun, TPAK yang tinggi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti eksploitasi pekerja, stress, dan kurangnya waktu untuk keluarga dan ibadah.

Oleh karena itu, penting untuk mencapai TPAK yang tinggi dengan cara yang seimbang dan etis. Negara, masyarakat, dan individu harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, adil, dan mensejahterakan semua pihak seperti yang disebutkan dalam Surah *At-Taubah*. Dengan demikian, TPAK yang tinggi dapat menjadi kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan umat, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Pembangunan harus berorientasi pada pembangunan manusia dari semua dimensi. Karena kepuasan manusia tidak hanya didapat dari sisi terwujudnya kebutuhan perekonomian. Namun, kebutuhan spiritual juga harus terpenuhi. Kebutuhan spiritual dan non material tidak dapat diukur menggunakan nilai, meski begitu hal ini tidak boleh diabaikan. Kesejahteraan yang sesungguhnya adalah keamanan kehidupan, harta

¹³⁵ Baghas Budi Wicaksono, "Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Bonus Demografi (Studi Empiris Di Provinsi Bali Periode 2010-2017)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2022): 12–21.

benda, kehidupan, kehormatan, kebebasan individu, pendidikan, pernikahan dan pengasuhan anak, dan minimasi kejahatan.

3. Indeks pembangunan manusia perspektif islam

Dalam Islam penjelasan mengenai indeks pembangunan manusia dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat tidak hanya berfokus pada pengukuran dari segi material namun diiringi dengan spiritual. Dalam perspektif syariah indeks pembangunan manusia dikenal dengan sebutan *Islamic Human Development Index* (IHDI). IHDI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif syariah. IHDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

”Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".”¹³⁶

Dalam tafsir jalalayn yang dikutip oleh ratih tamimah, menyebutkan bahwa (Dan di antara mereka ada pula yang berdoa, "Ya Tuhan kami! Berilah kami di dunia kebaikan), artinya nikmat, (di akhirat kebaikan) yakni surga, (dan peliharalah kami dari siksa neraka.") yakni

¹³⁶ Kemenag, "Al-Baqarah."

dengan tidak memasukinya.¹³⁷ Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang-orang musyrik dan keadaan orang-orang beriman, yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijanjikan akan beroleh pahala dengan firman-Nya.

Tafsir tersebut dapat dipahami bahwa dua macam kenikmatan atau tolak ukur atau juga indikator kesejahteraan terdapat pada dua aspek yakni duniawi dan ukhrawi. Menurut Al-Ghazali dalam penelitiannya Ariza, kesejahteraan manusia terletak pada memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹³⁸ Dalam Islam juga diajarkan mengenai keadilan, kepemilikan dan transparan mengenai hak individual dan masyarakat. Sama halnya dengan indeks pembangunan manusia dalam capaian pembangunan kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak.

Menurut Aritonang, pembangunan harus berorientasi pada pembangunan manusia dari semua dimensi, karena kepuasan manusia tidak hanya didapat dari sisi terwujudnya kebutuhan perekonomian. Namun, kebutuhan spiritual juga harus terpenuhi.¹³⁹ Kebutuhan spiritual dan non material tidak dapat diukur menggunakan nilai, meski begitu hal ini tidak boleh diabaikan. Ia juga menambahkan, kesejahteraan yang

¹³⁷ Inayah Swasti. Tamimah Ratih, "Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2021): 1689–1699.

¹³⁸ Ariza, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Islam."

¹³⁹ Wahyuni Aritonang., "Pengaruh Bonus Demografi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kajian Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." (Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26633/>.

sesungguhnya adalah keamanan kehidupan, harta benda, kehidupan, kehormatan, kebebasan individu, pendidikan, pernikahan dan pengasuhan anak, dan minimasi kejahatan.¹⁴⁰

4. Kemiskinan perspektif islam

Dalam tulisannya aprianton, dijelaskan makna kemiskinan, kemiskinan berasal dari kata miskin dan memiliki persamaan definisi dengan “kefakiran” yang berasal dari “fakir”. Dua kata tersebut biasanya dijadikan satu yakni kata “fakir miskin” dan biasa juga dimaknai kemiskinan yang sangat.¹⁴¹ Banyak kata-kata dalam Al-Qur’an menggambarkan kemiskinan; *faqir, miskin, sail, dan mahrum*, tetapi fakir dan miskin adalah dua kata yang sering disebutkan dalamnya. Adapun fakir tertulis sebanyak dua belas kali dan miskin disebut sebanyak dua puluh lima kali.

Rodin menulis Tentang dua golongan tersebut. Yakni pertama pertama, kata fakir dan miskin pada hakikatnya adalah sama.¹⁴² Aprianto menambahkan pendapat tersebut disetujui oleh pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik¹⁴³.

Dalam tulisannya Aprianto juga menyatakan bahwa Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Kiky Aprianto and Naerul Edwin, “Kemiskinan Dalam ...” 8, no. 2 (2017): 169–188.

¹⁴² Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 71–102.

¹⁴³ Aprianto and Edwin, “Kemiskinan Dalam ...”

akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat.¹⁴⁴ Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat orang-orang lupa adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW yang dikutip dari tulisannya Ilmi, bagaimana bahayanya kemiskinan (kefakiran), Hadisnya sebagai berikut:

“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran”.

(HR. Abu Daud)

Ia menjelaskan bahwa Nabi saw. mengucapkan do'a tersebut berarti mewajibkan setiap individu untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan itu sama celanya dengan kekufuran, dan karena setiap individu harus memerangi kekufuran, berarti juga harus memerangi kemiskinan.¹⁴⁵ Hadist juga diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan dapat menjadi bahaya dan mala petaka tersendiri dimasyarakat bila tidak diurus degan baik. Kemiskinan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁴⁶ Selain itu, dari penjelasan di atas, isu kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal. Dalam tulisannya Aprianto menyebutkan, definisi kebutuhan pokok ini bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah.¹⁴⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Quraisy ayat: 1-4;

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Syaiful Ilmi, “Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam,” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 67.

¹⁴⁶ Yolanda Ruchiyani et al., “Faktor-Faktor Penyebab Kerentanan Ekonomi Indonesia.”

¹⁴⁷ Aprianto and Edwin, “Kemiskinan Dalam”

5. *Dependency ratio* perspektif Islam

Rasio ketergantungan dalam Islam menjadi indikator penting yang mencerminkan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bakung Islam memandang setiap individu, dari anak-anak hingga lansia, memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dan berkontribusi pada kemajuan bersama.¹⁵¹ Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya dan anaknya menghormati orangtuanya:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir yang dikutip dari tulisannya afifah, ayat diatas menjelaskan larangan membentak-bentak kedua orang tua atau salah seorang di antara mereka. Tetapi sebaliknya hendaklah mengucapkan kata-kata yang normal. Sopan santun, lemah-lembut di

¹⁵¹ Dolot Alhasni Bakung et al., “Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo,” *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 142–155.

hadapan mereka. Ibnu katsir juga menjelaskan, rendahkanlah dirimu kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan berdo'alah untuk mereka berdua dengan mengucapkan “Ya Tuhanku, kasihanilah dan rahmatilah kedua ayah ibuku, sebagaimana mereka berdua telah mendidikkmu sewaktu aku kecil dengan penuh kasih sayang”.¹⁵²

Dari tafisr diatas dapat dipahami bahwa, anak-anak adalah amanah dan investasi masa depan. Orang tua dan masyarakat berkewajiban untuk merawat, mendidik, dan membimbing mereka menjadi generasi penerus yang berkualitas, berakhlak mulia dan adapun orang tua dan Lansia adalah sumber hikmah dan pengalaman. Anak-anak dan masyarakat berkewajiban untuk merawat, menghormati, dan menghargai ilmu serta pengalaman mereka, sehingga tercipta hubungan antar generasi yang harmonis dan saling menguatkan.

Rasio ketergantungan yang tinggi dapat menimbulkan beban ekonomi bagi penduduk usia produktif, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan berpotensi menimbulkan kesenjangan, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Arifin dan Faridatussalam.¹⁵³ Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan gotong royong antar sesama anggota masyarakat. Islam menawarkan solusi komprehensif yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan

¹⁵² Rofi'atul Afifah, Rizki Dwi Oktavia, and Aning Zainun Qoni'ah, “Studi Penafsiran Surat Al-Isra’ Ayat 23-24 Tentang Pendidikan Birru Al-Walidain,” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 17–35.

¹⁵³ Fuad Arifin and Sitti Retno Faridatussalam, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Bonus Demografi Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021.”

sosial, dan keseimbangan untuk mengoptimalkan rasio ketergantungan dan membangun masyarakat yang sejahtera. Diantaranya yakni Peningkatan Kualitas SDM. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan keterampilan dan keahlian, untuk menghasilkan generasi muda yang produktif, berdaya saing, dan siap berkontribusi pada pembangunan bangsa. Islam juga menawarkan konsep Penguatan Jaminan Sosial seperti Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk membantu kelompok miskin dan rentan, sehingga tercipta masyarakat yang saling menopang dan gotong royong.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian penelitian-penelitian Terdahulu dibawah ini menjadi salah satu acuan proposal ini, sehingga proposal ini dapat merujuk dan menampung teori-teori yang berkaitan sekaligus menjadi bahan kajian. Terdapat satu judul penelitian yang serupa, akan tetapi lokasi dan waktu subyek yang diteliti berbeda. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian yang peneliti tulis:

Tabel 2.0.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Fuad Arifin (2023)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Bonus Demografi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021	Analisis Regresi dengan data panel	Variabel bebas (X): Populasi Penduduk, TPAK, TPT, IPM & Jumlah Penduduk Miskin Variabel terikat (Y): <i>Dependency ratio</i>	Populasi Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Miskin memiliki pengaruh terhadap <i>Dependency Ratio</i> , sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak memiliki pengaruh Terhadap <i>Dependency Ratio</i> .	-Pendeatan kuantitatif -Menggunakan variabel terikat dan bebas yang sama.	-tidak terdapat variabel moderasi -tidak menggunakan analisis PLS-SEM -ada tambahan tingkat pengangguran terbuka -Lokasi dan waktu penelitian -Kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>dependency ratio</i>
	Zuhairoh, S. (2018).	Pengaruh Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Analisis regresi linier sederhana menggunakan data tingkat provinsi di Indonesia.	Rasio ketergantungan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Rasio ketergantungan memiliki pengaruh negatif terhadap IPM di Indonesia.	-Rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap IPM	-Hanya menggunakan 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat tanpa variabel moderasi
	Afandi, Aulia, Andika Pratama, and Darmawan syah (2023)	<i>Analysis of Dependency Ratio and Sex Ratio on Economic Growth and HDI in Aceh Tamiang District</i>	analisis regresi linier berganda	X1: <i>dependency ratio</i> X2: <i>sex ratio</i> Y1: IPM Y2: Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel <i>depedency ratio</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan	-Membahas mengenai <i>dependency ratio</i> dan IPM	- <i>dependency ratio</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>dependency ratio</i>

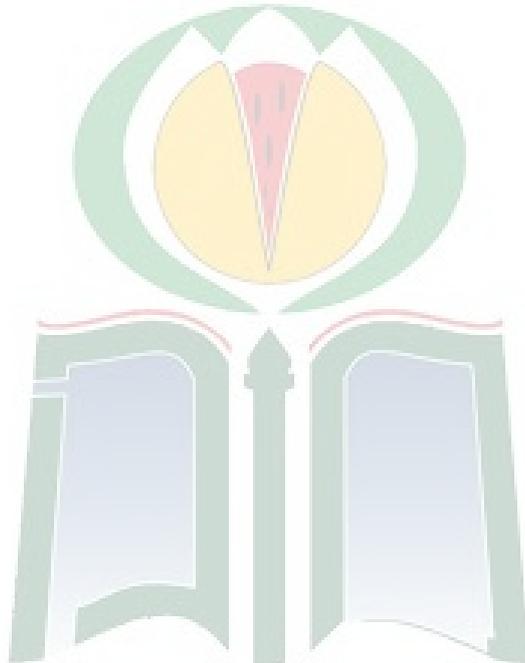
					ekonomi dan ipm di kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan variabel <i>sex ratio</i> secara parsial berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Tamiang.. secara simultan variabel <i>depedency ratio</i> dan <i>sex ratio</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Tamian		
	Abd El-khalek, Abeer Mohamed Ali. (2020)	<i>The Dynamic Relation between Population and Economic Development; a Systematic Analysis Review Considering Developing Countries' Empirical Evidence</i>	<i>Deductive approach was employed to analyse conceptual approaches</i>	-	<i>It has been concluded that population growth is an important factor affecting economic growth, and hence economic development but the strength and the trend of that relation varies between countries depending on many factors and can be</i>	Membahas tentang populasi penduduk	-Menngunakan pendekatan kualitatif

					<p><i>well-oriented using adequate policies. So, many policy recommendation were developed as this systematic review is supposed to be helpful for policy makers, specifically in developing countries, to design appropriate population policies in consistence to economic development targets</i></p>		
	<p>Wahyuni Aritonang. (2022)</p>	<p>Pengaruh Bonus Demografi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Kajian Dalam Perspektif Ekonomi Syariah</p>	<p><i>regresi panel metode fixed effect (crossection weights)</i></p>	<p>X1:bonus demografi X2:IPM Y1 :pertumbuhan</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa bonus demografi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi diasumsikan dapat mendorong perekonomian nasional melalui pertumbuhan tenaga kerja produktif, namun hal tersebut ternyata belum terealisasi dengan baik karena kebijakan pemerintah yang</p>	<p>-Menggunakan variabel IPM -pendekatan kuantitatif -mengunakan data BPS</p>	<p>- Seluruh varabelnya berbeda kecuali IPM</p>

					masih belum optimal dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia berepengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.		
anda Fitri Yenny and Khairil Anwar (2020)	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe,	a metode Regresi Linier Sederhana (RLS).	X: Jumlah Penduduk Y: Pertumbuhan Ekonomi	<i>The results of this study indicate that the population variable does not have a negative effect on population growth and the magnitude of the influence of the population variable on economic growth is 0.0938 (9.38%).</i>	Menggunakan data publikasi BPS Menngunakna varabel populasi pendudu	Variable selain populasi penduduk berbeda. Metode penelitian berbeda	

I. Alur Berpikir Penelitian

Penelitian ini menggunakan *kuantitatif method*. Dengan menganalisis data sekunder. Alur atau tahapan analisis dibantu dengan SmartPLS untuk *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) secara umum meliputi; persiapan data, membuat model structural, menjalankan algoritma PLS, evaluasi mode pengukuran, evaluasi model struktur dan interpretasi hasil.



J. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hipo berarti kurang atau lemah dan tesis atau thesis yang berarti teori yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesis telah terbukti kebenarannya ia akan berubah namanya menjadi tesis. Hipotesis dapat diterima tetapi juga dapat ditolak, diterima apabila bahan-bahan penelitian membenarkan kenyataan dan ditolak apabila menyangkal (menolak kenyataan)¹

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 = Diduga Populasi penduduk berpengaruh terhadap *dependency ratio* Provinsi Maluku

H2 = Diduga Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap *dependency ratio* Provinsi Maluku

¹ Hery Purnomo Arif Rachman, Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Bambang Ismaya, 1st ed. (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf.

- H3 = Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap *dependency ratio* Provinsi Maluku
- H4 = Diduga kemiskinan berpengaruh terhadap *dependency ratio* Provinsi Maluku
- H5 = Diduga kemiskinan memoderasi pengaruh populasi penduduk terhadap *dependency ratio* di Provinsi Maluku
- H6 = Diduga kemiskinan memoderasi pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap *dependency ratio* di Provinsi Maluku
- H7 = Diduga Kemiskinan memoderasi pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap *dependency ratio* di Provinsi Maluku

